
ARTIKEL PENELITIAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA SENSUS PENDUDUK PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

¹Dwitia Prayoto[✉]

Politeknik Negeri Pontianak¹

Abstrak

Pengolahan data Sensus Penduduk merupakan kegiatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat Provinsi untuk mengolah data hasil Sensus Penduduk, data tersebut diambil dari lembar kuesioner yang kemudian disebut SP2020-C1. Kemudian diolah dalam tiga tahapan yakni Pemotongan (*Guillotine*), Pemindaian (*Scanning*) dan Pengoreksian dan Validasi (*Corection and Validation*). Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang ditemui yaitu keterlambatan pengolahan data, jumlah SP2020-C1 yang diolah tidak sesuai dengan perencanaan awal, sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan fasilitas yang masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan pengolahan data Sensus Penduduk pada BPS Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara capaian target yang telah ditentukan di awal pelaksanaan pengolahan data Sensus Penduduk 2020 tidak sesuai namun secara dokumen yang masuk pelaksanaan pengolahan data Sensus Penduduk 2020 dapat terselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum BPS Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pengolahan data secara efektif namun kurang efisien. Hal-hal yang menjadi kendala pelaksanaan pengolahan data Sensus Penduduk 2020 merupakan faktor di luar pelaksanaan pengolahan data Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengolahan Data, Sensus Penduduk

[✉] Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: tiodiraizel@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendataan jumlah penduduk merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mengetahui jumlah penduduk pada suatu daerah maupun negara. Selain untuk mengetahui jumlah penduduk pendataan dimaksudkan untuk mengetahui profil penduduk suatu negara. Pendataan penduduk terbilang sangat penting bagi pemerintah atau negara karena dengan mengetahui profil penduduk dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Seperti halnya di Indonesia pendataan penduduk disebut juga dengan Sensus Penduduk.

Sensus Penduduk merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPS. BPS sendiri memiliki tugas sebagai penyelenggara statistik dasar salah satu penyelenggaraan statistik dasar ialah menyelenggarakan sensus penduduk. Kegiatan sensus penduduk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa lembaga yang memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan sensus penduduk ialah BPS yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka nol. Sensus penduduk telah dilaksanakan tujuh kali dan sensus penduduk yang ketujuh kali dilaksanakan pada tahun 2020.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Keenam sensus penduduk

sebelumnya dilaksanakan pada 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Metode ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "Satu Data Kependudukan Indonesia".

Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk BPS yang berada pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki perannya masing-masing. Pada BPS Kalimantan Barat bertanggung jawab pada pelaksanaan Sensus Penduduk di Kalimantan Barat yang kemudian melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat dimana BPS Kabupaten/Kota melaksanakan langsung kegiatan pendataan lapangan yang dibantu oleh Mitra Kerja BPS. Mitra Kerja BPS merupakan pekerja kontrak kegiatan tertentu termasuk salah satunya kegiatan Sensus Penduduk sistem perekrutan Mitra Kerja BPS dibuka secara umum yang kemudian ditentukan berdasarkan seleksi yang dilakukan BPS

Kabupaten/Kota. BPS Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertanggung jawab melaksanakan pelatihan terhadap Mitra Kerja BPS, melakukan pendampingan kepada BPS Kabupaten/Kota, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya Sensus Penduduk pada Provinsi Kalimantan Barat.

Selain melakukan tugas tugas tersebut BPS Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki tugas lain yaitu Pengolahan Data Sensus Penduduk. Pengolahan Data Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat merupakan kegiatan untuk mengolah data hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota. Data tersebut diambil dari lembar kuesioner yang kemudian disebut SP2020-C1 angka 2020 pada penamaan tersebut mengacu pada tahun berapa Sensus Penduduk dilaksanakan, lembar tersebut berisi data dari penduduk mulai dari nama, pendidikan hingga pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Kemudian lembar SP2020-C1 tersebut dikumpulkan berdasarkan Satuan Lingkung Setempat (SLS) yang kemudian tiap SLS dikirim ke BPS Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian dapat diolah. Pengolahan Data yang dimaksud terdiri dari pemotongan lembar SP2020-C1 yang disebut juga *Guillotine*, kemudian setelah dipotong kegiatan selanjutnya adalah pemindaian yang disebut juga *Scanning*, selanjutnya rangkaian kegiatan terakhir adalah *Correction and Validation*. Kegunaan dari data yang telah diolah adalah sebagai bahan publikasi profil

penduduk Kalimantan Barat selain itu data tersebut juga dikirim ke BPS RI untuk kemudian menjadi Data Induk penduduk Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk pada BPS Provinsi Kalimantan Barat masih ditemukan berbagai kendala seperti: (a) Pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 baru dilaksanakan pada tahun 2021. (b) Pembatasan Mitra Kerja BPS yang terbagi dalam dua sesi. (c) Mitra Kerja pada sektor *Guillotine* merasa kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. (d) Keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pada sektor *Scanning*.

Berdasarkan fenomena tersebut, Pengolahan Data Sensus Penduduk mengalami keterlambatan sehingga BPS Provinsi Kalimantan Barat harus melakukan penyesuaian yang mana peneliti memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data diolah kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Keseluruhan

Sasaran utama dalam Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 adalah bagaimana merekam data hasil pendataan lapangan atau pencacahan kedalam bentuk digital

dengan beberapa tahapan. Dari setiap tahapan tersebut yang menjadi patokan bagaimana efektivitas dari Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020. Selain itu terdapat juga target pengolahan dokumen yang telah direncanakan diawal, apakah telah memenuhi secara jumlah maupun waktu yang telah ditentukan.

Dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada para informan peneliti memahami bahwa dalam pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 untuk menjawab indikator efektivitas pertama yaitu efektivitas keseluruhan yang menurut Steers (1985), "Efektivitas keseluruhan, sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarnya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian yang umum mengenai efektivitas organisasi." Dari pertanyaan yang diajukan kepada BPS Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan seluruh tugas pokoknya dan telah mencapai semua sasaran yang diinginkan dalam Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 walaupun terdapat beberapa hambatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Perencanaan awal pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 memang direncanakan pada tahun 2020 tetapi terdapat hambatan yaitu pandemi jadi Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 hambatan tersebut tentu

berpengaruh kepada para pembuat kebijakan, data yang seharusnya siap pada tahun 2020 mengalami kemunduran yang mana membuat para pembuat kebijakan dengan kata lain pemerintah tidak dapat menggunakan data terbaru dalam membuat kebijakan. Selain itu hambatan juga terjadi pada sektor (tahapan) *guillotine* dimana mereka melakukan pekerjaan 2 *shift* sekaligus ketika sektor (tahapan) lain melakukan tugas mereka secara bergantian, hambatan tersebut tentunya mengganggu psikologi mitra kerja pada sektor (tahapan) *guillotine* yang membuat motivasi kerja mereka melemah walaupun pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

Kualitas

Untuk menilai indikator kualitas peneliti menanyakan pertanyaan ke semua informan terkait bagaimana kualitas yang diharapkan dari objek pengolahan itu sendiri yakni SP2020-C1 dan kualitas secara umum.

Berdasarkan penjelasan semua informan peneliti memahami bahwa secara umum kualitas yang diinginkan sudah tercapai namun hanya ada beberapa SP2020-C1 yang tidak sesuai. Lembar SP2020-C1 merupakan objek pengolahan kualitas dari SP2020-C1 sangat berpengaruh pada hasil akhir Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020, ketika SP2020-C1 yang diolah dalam keadaan baik maka Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 juga akan berjalan dengan baik

namun sebaliknya ketika SP2020-C1 yang diolah keadaannya tidak baik maka Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 akan terhambat. Pada sektor (tahapan) *scanning* dan *validation/entry* ditemui beberapa lembar SP2020-C1 yang tidak sesuai dengan seharusnya sehingga menyulitkan mitra kerja dalam melaksanakan tugasnya namun ketika dibandingkan SP2020-C1 yang tidak sesuai hanya dalam jumlah sedikit sisanya dapat diolah dengan baik. Kemudian untuk menjawab indikator kualitas bahwa kualitas Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 pada BPS Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai, hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Steers (1985), "Kualitas, kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi, ini mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi". Dari apa yang dikemukakan Steers dapat dipahami bahwa bagaimana kualitas yang dihasilkan dari organisasi dalam hal ini yaitu BPS Provinsi Kalimantan Barat, dimana hasil dari Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Produktivitas

Terkait indikator produktivitas peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan peneliti menemukan bahwa untuk sektor (tahapan) *Guillotine* masih kurang SDM untuk menangani tugas tersebut akan tetapi dari pemahaman pembuat kebijakan

jumlah tersebut dapat dikatakan ideal hal ini menjadi permasalahan yang kemudian harus diselesaikan sehingga SDM mencukupi untuk melaksanakan tugas tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa untuk indikator produktivitas bahwa dokumen yang diolah telah terselesaikan namun masih ada kekurangan SDM di sektor (tahapan) *Guillotine*. Selain itu, metode sensus menggunakan DOPU (*Drop Off-Pick Up*) juga menjadi hambatan karena dokumen yang menggunakan metode DOPU tidak layak olah sehingga dokumen yang seharusnya diolah jadi tidak dapat diolah hambatan tersebut berpengaruh pada kebijakan yang akan dibuat dengan data tersebut, ketersediaan data tidak lengkap. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Steers (1985), "Produktivitas, kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi dapat diukur menurut tiga tingkatan. Tingkat individual, kelompok, dan keseluruhan organisasi." Jadi, berdasarkan penjabaran tersebut bahwa BPS Provinsi Kalimantan Barat dalam tingkat keseluruhan organisasi, produktivitas dalam Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 telah sesuai namun dari tingkat Individual dan Kelompok khususnya pada sektor (tahapan) *guillotine*, produktivitas dalam Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 belum sesuai.

Kesiagaan

Untuk menganalisa indikator kesiagaan, peneliti bertanya kepada informan terkait bagaimana

tanggapan para mitra kerja saat melakukan tugas tambahan diluar jam kerja hasil yang peneliti temui bahwa pada sektor (tahapan) *guillotine* tanggapan mitra kerja kurang senang namun tugas tersebut tetap dilaksanakan. Berdasarkan yang disampaikan Steers (1985:46), "Kesiagaan, penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan baik jika diminta." Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa permasalahan tadi tidak begitu menjadi kendala yang berarti karena pada akhirnya pada sektor (tahapan) *guillotine* dapat menyelesaikan dan mampu menyelesaikan tugas khusus atau dapat dikatakan kerja lembur.

Efisiensi

Untuk menjawab indikator efisiensi peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan waktu, sarana dan prasarana serta sumber daya yang digunakan. Peneliti menemui bahwa Secara umum untuk sarana prasarana dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala yaitu prasarana atau ruangan sehingga mempengaruhi waktu penggerjaan di sektor (tahapan) *guillotine* untuk sarana terbilang sudah memadai semua. Kalau dilihat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steers (1985), "Efisiensi, nisbah yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut." Dapat dijabarkan bahwa bagaimana kesuaian antara

penggunaan fasilitas dengan kualitas yang dihasilkan semakin kecil penggunaan waktu dan penggunaan biaya maka pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 telah efisensi dengan tetap memperhatikan kualitas yang dihasilkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 telah efisensi namun ketika melihat secara detail terdapat beberapa alasan yang dapat menjadikan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 tidak efisien yaitu perencanaan waktu yang ditentukan oleh pedoman teknis, SDM pada sektor (tahapan) *guillotine*, Prasrana yang digunakan, dan tidak menentunya keadaan keuangan pada BPS Provinsi Kalimantan Barat yang disebabkan oleh keadaan ekonomi nasional yang kurang stabil akibat dari pandemi.

Berdasarkan analisis data yang ditemukan melalui metode wawancara dan menyocokkan kembali dengan teori indikator efektivitas yang digunakan peneliti menjabarkan bahwa secara umum kelima indikator tersebut dapat terjawab dengan baik dengan beberapa pengecualian didalamnya. Untuk permasalahan yang pertama adalah pada indikator produktivitas terdapat permasalahan minor yaitu tidak tercapainya produktivitas di tingkatan individu dan kelompok, permasalahan yang ditemui pada indikator ini adalah permasalahan sumber daya manusia dimana pada sektor (tahapan) *guillotine* sumber daya manusianya tidak terpenuhi yang berpengaruh pada motivasi

kerja yang menurun, namun secara keseluruhan organisasi telah tercapai. Kemudian perencanaan awal pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 memang direncanakan pada tahun 2020 tetapi terdapat hambatan yaitu pandemi jadi Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 hambatan tersebut tentu berpengaruh kepada para pembuat kebijakan, data yang seharusnya siap pada tahun 2020 mengalami kemunduran yang mana membuat para pembuat kebijakan dengan kata lain pemerintah tidak dapat menggunakan data terbaru dalam membuat kebijakan.

Selain permasalahan tersebut terdapat juga permasalahan yaitu terdapat beberapa dokumen yang tidak diolah dikarenakan dokumen tersebut tidak diterima oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat penyebabnya adalah metode sensus menggunakan DOPU (*Drop Off-Pick Up*) dimana dokumen yang diterima tidak layak untuk diolah, permasalahan tersebut berpengaruh pada pembuat kebijakan karena data yang tersedia tidak terpenuhi dengan lengkap. Selanjutnya pada indikator efisiensi terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 tidak efisien yaitu pada perencanaan waktu yang tidak sesuai dengan pedoman teknis dimana Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 dilakukan pada tahun 2020 tapi dilakukan pada tahun 2021, kemudian SDM yang tidak mencukupi pada sektor

(tahapan) *guillotine*, selain itu fasilitas juga menjadi permasalahan dimana prasarana yang belum memadai, keadaan ekonomi nasional yang tidak menentu.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa ketersediaan data yang disediakan oleh BPS dalam penelitian ini pada BPS Provinsi Kalimantan Barat menjadi pengaruh pada pembuatan kebijakan, data yang harusnya sudah siap pada tahun 2020 diundur menjadi tahun 2021 yang berakibat pada kebijakan yang tidak relevan dengan data yang terbarukan. Keadaan ekonomi juga menjadi berpengaruh dikarenakan faktor fasilitas sangat berpengaruh pada efisiensi pekerjaan ketika fasilitas terpenuhi dengan baik maka pekerjaan akan berjalan dengan sempurna dimana fasilitas dapat dipenuhi oleh faktor keuangan yang cukup.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk produktivitas terdapat kendala dimana pada tingkat Individual dan Kelompok yang produktivitasnya tidak baik pada sektor (tahapan) *guillotine* mitra kerja merasa SDM pada sektor (tahapan) tersebut kurang sehingga menyulitkan mitra kerja dalam melaksanakan tugasnya namun pada hasil akhir mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Selanjutnya pada indikator Efisiensi terdapat prasarana yang kurang memadai yaitu ruangan potong atau *guillotine* yang jauh sehingga memangkas

waktu perjalanan, kelistrikan yang tidak stabil juga menjadi kendala kemudian alat *scanning* yang digunakan juga rusak. Secara capaian target yang telah ditentukan di awal Pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 tidak sesuai rencana namun secara dokumen yang masuk Pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 dapat terselesaikan semua.

Terkait dengan Pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 pada BPS Provinsi Kalimantan Barat beberapa hal yang dapat rekomendasikan untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan serupa untuk kedepannya seperti Penetapan kebijakan DOPU (*Drop Off-Pick Up*) untuk Provinsi Kalimantan Barat harus dikaji ulang dikarenakan hal tersebut

berpengaruh pada target pengolahan data sensus penduduk yang tidak sesuai sehingga banyak dokumen yang tidak layak olah.

Selanjutnya BPS Provinsi Kalimantan Barat harus mengkaji ulang terkait jumlah Mitra Kerja pada sektor (tahapan) *guillotine* yang ideal, sehingga memudahkan Mitra Kerja pada sektor (tahapan) *guillotine* dalam melaksanakan tugasnya dan demi terwujudnya asas keadilan dalam beban tugas serta BPS Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mengkaji ulang terkait penggunaan ruangan yang cocok untuk Pengolahan Data Sensus Penduduk 2020 khususnya pada ruang *guillotine*. Sosialisasi yang dilakukan harus lebih giat dalam pemerataan informasi terkait kualitas SP2020-C1 yang baik untuk Pengolahan Data Sensus Penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Pedoman Teknis BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Buku 1 Pendataan Long Form SP2020*. BPS, Indonesia. 2021.
- Steers, M Richard. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta. 1985
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-26. CV ALFABETA, Bandung. 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 003 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah.